

## **PERAN UNI EMIRAT ARAB DALAM DINAMIKA KONFLIK SUDAN: ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL DAN STRATEGI REGIONAL DI AFRIKA TIMUR**

**Edward Sitorus<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

*The UAE's role in the dynamics of the Sudanese conflict reflects a complex foreign policy transformation: from investment-based economic diplomacy to power-based strategic diplomacy. Sudan, in this case, is not simply an economic partner or aid recipient, but also a strategic arena for the UAE to demonstrate its capabilities and capacity as a new global actor in East Africa. This research is relevant not only for understanding the bilateral relationship between the UAE and Sudan, but also for mapping the direction of UAE foreign policy in Africa and its impact on the stability of the Red Sea region. This research uses qualitative research, using the triangulation method as a fundraising technique. The results show that the Sudanese conflict not only represents a domestic crisis but also reflects the dynamics of regional and international power politics in East Africa. Understanding the UAE's role provides a broader picture of how internal conflicts in Africa are increasingly connected to the strategic interests of external actors.*

*Keywords: Role, National Interest, Conflict, Regional Strategy*

### **ABSTRAK**

*Peran UEA dalam dinamika konflik Sudan mencerminkan transformasi politik luar negeri yang kompleks: dari diplomasi ekonomi berbasis investasi menuju diplomasi strategis berbasis kekuatan. Sudan, dalam hal ini, bukan sekadar mitra ekonomi atau penerima bantuan, tetapi juga arena strategis bagi UEA untuk membuktikan kemampuan dan kapasitasnya sebagai aktor global baru di Afrika Timur. Penelitian ini menjadi relevan tidak hanya untuk memahami hubungan bilateral antara UEA dan Sudan, tetapi juga untuk memetakan arah kebijakan luar negeri UEA di Afrika serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Laut Merah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Sudan tidak hanya merepresentasikan krisis domestik, tetapi juga menjadi cermin dari dinamika politik kekuatan regional dan internasional di Afrika Timur. Pemahaman terhadap peran UEA memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana konflik internal di Afrika semakin terhubung dengan kepentingan strategis aktor eksternal.*

*Kata kunci: Peran, Kepentingan Nasional, Konflik, Strategi regional*

### **PENDAHULUAN**

Dalam satu dekade terakhir, dinamika geopolitik di kawasan Afrika Timur dan Laut Merah mengalami perubahan signifikan yang menandai munculnya babak baru dalam perebutan pengaruh antarnegara regional dan global. Kawasan ini menjadi perhatian strategis bagi banyak aktor karena posisinya yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Afrika melalui jalur maritim vital yang melintasi Selat Bab al-Mandab hingga ke Terusan Suez. Jalur tersebut merupakan salah satu koridor energi dan perdagangan tersibuk di dunia, dengan

lebih dari 10 persen perdagangan global melaluinya setiap tahun (Katzman, 2021). Kondisi geografis yang strategis ini menjadikan Laut Merah dan Afrika Timur sebagai wilayah kunci bagi stabilitas ekonomi global dan keamanan energi internasional.

Dalam konteks ini, Sudan menempati posisi yang sangat penting. Negara tersebut memiliki garis pantai panjang di Laut Merah, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geopolitik yang menjadi jembatan antara Afrika Utara dan Sub-Sahara. Namun, potensi strategis ini diiringi dengan kompleksitas politik internal yang mendalam. Sejak kejatuhan rezim Omar al-Bashir pada tahun 2019, Sudan belum berhasil menstabilkan situasi domestiknya. Transisi menuju pemerintahan sipil terhambat oleh perebutan kekuasaan antara militer reguler Sudan Armed Forces (SAF) dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF), yang pada akhirnya memicu perang saudara baru pada tahun 2023. Konflik ini menimbulkan krisis kemanusiaan besar, memaksa jutaan warga mengungsi, serta menimbulkan ketidakstabilan di seluruh kawasan (International Crisis Group, 2024).

Instabilitas Sudan menciptakan ruang kosong kekuasaan yang menjadi magnet bagi intervensi eksternal, terutama dari negara-negara Timur Tengah yang memiliki kepentingan strategis di Afrika. Uni Emirat Arab (UEA) adalah salah satu aktor yang paling aktif dan berpengaruh dalam konteks ini. Sejak pertengahan 2010-an, UEA memperlihatkan ekspansi kebijakan luar negeri yang agresif dan proaktif ke kawasan Afrika Timur, baik melalui investasi ekonomi, bantuan kemanusiaan, maupun dukungan militer terhadap aktor-aktor lokal. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi mendalam dalam cara Abu Dhabi mendefinisikan dan melindungi kepentingan nasionalnya di luar kawasan Teluk (Almezaini, 2020).

Kepentingan nasional UEA di Sudan bersifat multidimensional. Dari aspek ekonomi, Sudan dipandang sebagai lahan subur untuk mendukung agenda ketahanan pangan nasional UEA. Sebagai negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, terutama lahan pertanian dan air, UEA berupaya mengamankan pasokan pangan jangka panjang melalui investasi agrikultur di negara-negara Afrika, termasuk Sudan, Etiopia, dan Tanzania (Hertog, 2021). Investasi UEA di sektor agrikultur Sudan tidak hanya berkaitan dengan pertanian konvensional, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur pelabuhan dan logistik yang terhubung langsung dengan Laut Merah. Dengan demikian, keterlibatan ekonomi UEA di Sudan sekaligus memperkuat kendali strategisnya atas rantai pasok regional di kawasan Laut Merah.

Selain kepentingan ekonomi, ada pula dimensi geopolitik dan keamanan yang sangat menonjol. UEA memandang Sudan sebagai bagian integral dari strategi keamanan maritimnya di Laut Merah dan Samudra Hindia. Bersama dengan Arab Saudi, UEA berupaya membentuk suatu arsitektur keamanan regional untuk mengimbangi pengaruh kekuatan lain seperti Iran, Turki, dan Qatar yang juga memiliki ambisi di kawasan tersebut (Juneau, 2022). Rivalitas geopolitik di Timur Tengah semakin meluas ke Afrika, menjadikan Sudan sebagai ajang perpanjangan tangan dari persaingan ideologi dan strategi antara blok-blok kekuasaan regional.

Dalam konteks konflik Sudan sendiri, UEA sering kali dikaitkan dengan dukungannya terhadap kelompok RSF, sebuah milisi yang awalnya merupakan bagian dari pasukan pemerintah namun kemudian berkembang menjadi kekuatan otonom di bawah

komando Mohamed Hamdan Dagalo, atau Hemedti. Dukungan UEA terhadap RSF diduga berbentuk bantuan logistik, pelatihan, dan dukungan finansial yang disalurkan melalui jaringan bantuan kemanusiaan dan jalur diplomatik tidak resmi (Reuters, 2024). Pola ini mirip dengan keterlibatan UEA di konflik Libya, di mana Abu Dhabi mendukung Jenderal Khalifa Haftar dengan alasan untuk menegakkan stabilitas dan melawan kelompok Islam politik (Pack, 2020). Dengan demikian, strategi UEA di Sudan mencerminkan pola proxy diplomacy yang digunakan untuk mengamankan kepentingan nasional tanpa keterlibatan militer langsung. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri UEA telah berevolusi dari orientasi ekonomi semata menjadi diplomasi berbasis kekuatan (*power-oriented diplomacy*). Di bawah kepemimpinan Mohammed bin Zayed Al Nahyan, UEA berupaya memosisikan dirinya sebagai kekuatan menengah (*middle power*) dengan kemampuan proyeksi strategis di luar wilayah Teluk. Ekspansi pengaruh di Afrika Timur menjadi bagian dari upaya tersebut, di mana Sudan berperan sebagai titik masuk penting dalam memperluas jejaring politik dan keamanan UEA di kawasan Laut Merah, Tanduk Afrika, hingga Afrika Sub-Sahara (Ulrichsen, 2020).

Namun demikian, keterlibatan UEA di Sudan tidak lepas dari kontroversi dan kritik internasional. Banyak pihak menilai bahwa campur tangan UEA justru memperumit konflik dan menghambat proses perdamaian. Laporan-laporan dari PBB dan lembaga kemanusiaan mengindikasikan bahwa suplai senjata dan dana yang mengalir dari UEA ke pihak-pihak tertentu dalam konflik Sudan telah memperpanjang penderitaan rakyat sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan (UN Panel of Experts, 2024). Di sisi lain, UEA menegaskan bahwa kebijakannya di Sudan semata-mata bertujuan untuk mendukung stabilitas regional, memulihkan ekonomi, dan menegakkan keamanan di kawasan Laut Merah. Pernyataan resmi tersebut menunjukkan adanya dualitas dalam pendekatan kebijakan luar negeri UEA: di satu sisi menggunakan narasi stabilitas dan pembangunan untuk membenarkan intervensi, di sisi lain memanfaatkan ketidakstabilan sebagai peluang untuk memperluas pengaruh strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan nasional UEA di Sudan tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga ekspansif. Sudan menjadi laboratorium kebijakan luar negeri baru bagi UEA untuk menguji efektivitas kombinasi antara diplomasi ekonomi, dukungan militer tidak langsung, dan manuver politik regional dalam membangun posisi sebagai kekuatan penentu di Afrika Timur.

Lebih jauh, kepentingan UEA di Sudan juga terkait erat dengan isu keamanan Laut Merah. Kawasan ini menjadi jalur vital yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama UEA seperti Jebel Ali dan Fujairah dengan pasar Eropa dan Afrika. Oleh karena itu, kontrol terhadap titik-titik strategis di sepanjang pesisir Laut Merah, termasuk Port Sudan, memiliki arti penting bagi keamanan ekonomi dan militer UEA. Di masa depan, keberadaan infrastruktur pelabuhan dan logistik yang dibiayai oleh UEA di Sudan dan Eritrea berpotensi memperluas kemampuan proyeksi maritimnya di luar Teluk Persia (Kamel, 2023). Namun, keterlibatan ekonomi dan keamanan tersebut menimbulkan implikasi jangka panjang terhadap stabilitas kawasan. Pertama, Sudan berpotensi menjadi arena baru bagi rivalitas antarnegara Teluk yang sebelumnya terkonsentrasi di Timur Tengah. Kedua, kehadiran UEA di Afrika Timur menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara besar seperti Mesir dan Etiopia yang memiliki kepentingan langsung terhadap aliran Sungai Nil dan jalur

perdagangan Laut Merah. Ketiga, dinamika tersebut berpotensi memicu fragmentasi politik di Sudan karena setiap aktor lokal dapat memperoleh dukungan eksternal yang memperkuat posisi mereka dalam konflik. Dengan kata lain, keterlibatan UEA, meskipun dibingkai dalam narasi stabilisasi, justru berisiko memperpanjang ketegangan dan memperdalam polarisasi politik di Sudan (de Waal, 2023).

Namun, pertanyaan yang muncul kemudian adalah sejauh mana keterlibatan UEA di Sudan benar-benar mencerminkan kepentingan nasional yang konstruktif dan sejauh mana hal itu konsisten dengan prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi dasar diplomasi Teluk. Kritik internasional terhadap kebijakan luar negeri UEA mencerminkan dilema antara ambisi ekspansi pengaruh dan kebutuhan menjaga reputasi sebagai mitra stabil di dunia Arab. Dalam konteks inilah, analisis terhadap kepentingan nasional UEA di Sudan menjadi penting untuk memahami keseimbangan antara idealisme politik luar negeri dan realitas geopolitik yang dihadapi negara tersebut.

Peran UEA dalam dinamika konflik Sudan mencerminkan transformasi politik luar negeri yang kompleks: dari diplomasi ekonomi berbasis investasi menuju diplomasi strategis berbasis kekuatan. Sudan, dalam hal ini, bukan sekadar mitra ekonomi atau penerima bantuan, tetapi juga arena strategis bagi UEA untuk membuktikan kemampuan dan kapasitasnya sebagai aktor global baru di Afrika Timur. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan tidak hanya untuk memahami hubungan bilateral antara UEA dan Sudan, tetapi juga untuk memetakan arah kebijakan luar negeri UEA di Afrika serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Laut Merah. Pada akhirnya, keterlibatan UEA di Sudan memperlihatkan paradoks yang menarik dalam hubungan internasional kontemporer: sebuah negara kecil dengan populasi terbatas mampu memainkan peran besar dalam konflik lintas kawasan melalui kombinasi diplomasi ekonomi, kekuatan militer tidak langsung, dan pengaruh ideologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa ukuran geografis tidak lagi menjadi penentu utama dalam politik global, melainkan kemampuan untuk mengintegrasikan sumber daya ekonomi, teknologi, dan strategi diplomatik dalam mencapai kepentingan nasional. Oleh sebab itu, analisis mendalam mengenai peran UEA di Sudan penting dilakukan untuk memahami bagaimana sebuah negara Teluk mampu mengubah lanskap geopolitik Afrika Timur melalui kebijakan luar negeri yang adaptif, realistis, dan ambisius.

## **KERANGKA ANALITIK**

### **Pendekatan Realisme**

Teori Realisme merupakan salah satu teori paling klasik dalam studi hubungan internasional yang menekankan bahwa sistem internasional bersifat anarkis dan tidak ada otoritas tertinggi di atas negara. Menurut Kenneth Waltz (1979) dalam *Theory of International Politics*, negara merupakan aktor utama yang bertindak rasional untuk menjamin kelangsungan hidupnya (self-preservation) melalui peningkatan kekuatan (power) dan keamanan (security). Dalam pandangan realisme, politik internasional adalah arena persaingan kekuasaan di mana setiap negara berupaya mempertahankan posisi dan kepentingannya.

Keterlibatan UEA dalam konflik Sudan dapat dijelaskan melalui pendekatan realisme ini. UEA melihat kawasan Afrika Timur sebagai arena strategis bagi persaingan kekuatan antarnegara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan Turki. Sudan menjadi medan perebutan pengaruh karena posisinya yang menghadap langsung ke Laut Merah dan berdekatan dengan Semenanjung Arab. Dalam konteks sistem internasional yang penuh ketidakpastian, UEA berupaya memproyeksikan kekuatan melalui diplomasi militer, bantuan kemanusiaan, dan investasi strategis untuk memastikan kehadiran dan pengaruhnya di kawasan tersebut. Dari sudut pandang realisme, langkah UEA untuk mendukung faksi-faksi militer di Sudan pasca-kejatuhan Omar al-Bashir merupakan strategi untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan bersahabat terhadap kepentingannya. UEA juga membangun pangkalan militer di Eritrea dan menjalin kemitraan keamanan dengan Mesir sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan (balance of power) dengan Turki dan Iran, dua negara yang juga memiliki agenda ekspansi pengaruh di kawasan Afrika.

Teori realisme juga menjelaskan bahwa negara kecil seperti UEA dapat menjadi kekuatan menengah (middle power) yang efektif melalui penggunaan kekuatan ekonomi sebagai alat pengaruh. Dalam hal ini, realisme memberi pemahaman bahwa tindakan UEA di Sudan tidak didorong oleh idealisme politik luar negeri, melainkan oleh kalkulasi rasional atas keuntungan strategis yang dapat diperoleh dari stabilitas Sudan dan kontrol terhadap jalur perdagangan di Laut Merah.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Teori Kepentingan Nasional merupakan salah satu fondasi utama dalam studi hubungan internasional klasik. Tokoh utama teori ini, Hans J. Morgenthau (1948), menyatakan bahwa setiap kebijakan luar negeri pada hakikatnya digerakkan oleh kepentingan nasional yang didefinisikan dalam kerangka kekuasaan (interest defined in terms of power). Artinya, setiap tindakan suatu negara baik diplomatik, ekonomi, maupun militer bertujuan untuk melindungi dan memperluas kepentingan nasionalnya di tengah sistem internasional yang anarkis.

Dalam konteks Uni Emirat Arab (UEA), kepentingan nasional menjadi landasan utama dalam memahami keterlibatannya di Sudan. Sebagai negara kecil dengan sumber daya energi besar dan posisi strategis di Teluk Arab, UEA menyadari bahwa keberlangsungan stabilitas politik dan ekonominya sangat bergantung pada kemampuannya memperluas jaringan pengaruh regional. Keterlibatan UEA dalam konflik Sudan bukan hanya persoalan solidaritas antarnegara Arab, tetapi merupakan refleksi dari upaya mempertahankan dan memperluas kepentingan nasional dalam bidang keamanan, ekonomi, dan pengaruh geopolitik.

Secara ekonomi, Sudan memiliki posisi strategis di Afrika Timur yang berdekatan dengan Laut Merah jalur vital perdagangan global yang menjadi penghubung antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Selain itu, Sudan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti emas, minyak, dan lahan pertanian produktif. Kondisi ini menjadikan Sudan menarik bagi investasi dan ekspansi ekonomi UEA, terutama melalui proyek infrastruktur dan pertanian yang didanai oleh Abu Dhabi. Melalui kebijakan investasi ini, UEA tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi tawar dan pengaruhnya di kawasan Afrika.

Dari sisi keamanan dan politik, keterlibatan UEA di Sudan berhubungan erat dengan kepentingannya dalam mengamankan jalur maritim di Laut Merah dan menahan pengaruh Iran serta Turki di kawasan tersebut. Sudan pasca-rezim Omar al-Bashir mengalami ketidakstabilan politik yang membuka ruang bagi kekuatan eksternal untuk ikut berperan. UEA memanfaatkan situasi ini dengan mendukung kelompok-kelompok militer tertentu yang dianggap mampu menjamin stabilitas politik sesuai kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa bagi UEA, kepentingan nasional tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memengaruhi arah politik negara mitra strategisnya.

Dengan demikian, teori kepentingan nasional memberikan kerangka untuk memahami motivasi mendasar di balik kebijakan UEA di Sudan bahwa tindakan-tindakan diplomatik, ekonomi, dan militer yang dilakukan merupakan instrumen untuk melindungi dan memperluas kekuasaan nasionalnya di Afrika Timur.

### **Teori Geopolitik Regional**

Teori geopolitik menyoroti pentingnya faktor geografi dalam menentukan strategi politik luar negeri dan keamanan suatu negara. Salah satu tokoh penting teori ini adalah Nicholas Spykman (1942) dengan konsep Rimland Theory, yang menekankan bahwa wilayah pesisir (rimland) memiliki arti strategis dalam menentukan keseimbangan kekuatan dunia. Dalam konteks ini, kawasan Laut Merah, Tanduk Afrika, dan Sudan merupakan bagian dari rimland yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tengah wilayah vital bagi jalur perdagangan global. Dari perspektif geopolitik, keterlibatan UEA di Sudan menunjukkan kesadaran strategis negara tersebut terhadap pentingnya mengontrol jalur logistik dan perdagangan internasional. Dengan menguasai titik-titik penting di sepanjang pesisir Laut Merah, seperti pelabuhan di Eritrea, Somalia, dan Sudan, UEA berusaha memperkuat keamanan ekonominya sekaligus memperluas pengaruh militernya. Proyek pembangunan infrastruktur pelabuhan yang dilakukan oleh perusahaan UEA, seperti DP World, menjadi bagian dari strategi geopolitik jangka panjang yang bertujuan menjadikan UEA sebagai pusat maritim global.

Selain itu, teori geopolitik juga menjelaskan bahwa Afrika Timur menjadi kawasan penting bagi UEA karena posisinya yang berhadapan langsung dengan kawasan Teluk, menjadikannya area perpanjangan dari keamanan nasional UEA. Dengan adanya ketegangan di Laut Merah dan meningkatnya kehadiran kekuatan global seperti Amerika Serikat dan China, UEA berusaha memastikan bahwa kawasan ini tetap berada dalam orbit pengaruhnya. Maka, Sudan menjadi elemen penting dalam arsitektur geopolitik UEA di Afrika Timur, baik untuk kepentingan ekonomi, militer, maupun politik. Dengan menggunakan teori geopolitik regional, penelitian ini dapat menjelaskan bahwa tindakan UEA bukan semata-mata bersifat reaktif terhadap konflik Sudan, tetapi merupakan bagian dari strategi sistematis untuk memperluas strategic depth di kawasan yang memiliki nilai geografis tinggi.

### **Konsep Strategi Regional**

Konsep strategi regional menjelaskan bagaimana suatu negara mengarahkan kebijakan luar negerinya untuk mencapai tujuan nasional melalui keterlibatan aktif di tingkat kawasan. Menurut Barry Buzan dan Ole Waever (2003) dalam Regional Security Complex

Theory, kawasan tertentu memiliki struktur keamanan yang saling bergantung (interdependence) di mana ancaman, konflik, dan kepentingan saling memengaruhi antarnegara di wilayah tersebut.

Dalam konteks Afrika Timur, UEA menerapkan strategi regional yang mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, diplomasi, dan keamanan. Melalui investasi besar di sektor pelabuhan, energi, dan pertanian di Sudan serta negara-negara tetangga seperti Ethiopia dan Eritrea, UEA membangun jaringan ekonomi yang memperkuat ketergantungannya dengan negara-negara tersebut. Secara diplomatik, UEA berperan sebagai mediator dalam sejumlah konflik kawasan, termasuk mendukung proses transisi politik di Sudan setelah jatuhnya al-Bashir. Di bidang keamanan, UEA memperkuat kerja sama militer dan intelijen dengan negara-negara Afrika Timur untuk mengantisipasi ancaman terorisme dan memastikan stabilitas politik yang menguntungkan kepentingannya.

Konsep strategi regional membantu menjelaskan bahwa kebijakan UEA di Sudan bukan tindakan terpisah, melainkan bagian dari kebijakan luar negeri komprehensif yang dirancang untuk memperkuat posisi UEA sebagai kekuatan regional lintas kawasan (cross-regional power). Strategi ini menunjukkan bahwa UEA memanfaatkan pendekatan pragmatis dan adaptif untuk membangun sphere of influence di Afrika Timur yang dapat mendukung stabilitas nasionalnya dan memperluas peran globalnya.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan-hubungan antar fenomena, dan menentukan kasualitas dari variable-variabel. Selain itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Data yang digunakan lebih banyak dalam bentuk kata, kalimat atau gambar sebagai hasil studi pustaka dan wawancara. Kalaupun ada angka-angka hanya bersifat penunjang; lebih menekankan proses kerja, yang seluruh fenomena yang dihadapi diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah; cenderung menggunakan pendekatan induktif, dimana abstraksi disusun atas data yang tersedia; lebih memberikan tekanan pada makna yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan.

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan bertujuan untuk mendeskripsikan dan kemudian menjelaskan, mengevaluasi dan memberikan preskripsi atau saran kepada lembaga pemerintah atau stakeholders yang lain terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan, yaitu mencari data serta informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal, clipping, majalah, makalah-makalah yang pernah diseminarkan, artikel-artikel dari

berbagai sumber, termasuk dari internet, maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam (depth interview). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Narasumber dalam wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan orang-orang yang terlibat secara langsung maupun para ahli atau akademisi yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema penelitian ini. Dengan demikian, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data secara triangulasi.

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat induktif, berkaitan dengan tipe penelitian kualitatif yang digunakan. Tehnik induktif ialah analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh, lalu dikembangkan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa melalui teknik analisis data, yaitu: Analisis domain, peneliti memperoleh gambaran umum mengenai objek penelitian; Analisis taksonomi, peneliti menjabarkan dan memilih data untuk ditetapkan sebagai fokus penelitan. Pengumpulan data terus dilakukan melalui perbaharuan data dan observasi mengenai masalah terkait; Analisis komponensial, peneliti melakukan analisis pencarian data yang sama melalui observasi, dan studi kepustakaan, sehingga akan banyak ditemukan data yang berbeda dari sumber-sumber tersebut untuk memperoleh data yang lebih spesifik lagi; dan Analisis Triangulasi yaitu mengkombinasikan seluruh teknik analisa yang dipergunakan sebelumnya, agar bisa saling melengkapi.

## **PEMBAHASAN**

Analisis peran Uni Emirat Arab (UEA) dalam dinamika konflik Sudan dapat dijelaskan secara komprehensif melalui perspektif kepentingan nasional dan teori realisme dalam hubungan internasional. Realisme memandang negara sebagai aktor rasional yang beroperasi dalam sistem internasional yang anarkis, di mana tujuan utama negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup, keamanan, dan kekuatan relatifnya. Dalam kerangka ini, keterlibatan UEA di Sudan merupakan ekspresi dari upaya rasional untuk mengamankan kepentingan nasional di kawasan strategis Afrika Timur dan Laut Merah (Morgenthau, 1948; Mearsheimer, 2014).

Konsep kepentingan nasional menjadi fondasi utama dalam realisme klasik. Morgenthau menegaskan bahwa kebijakan luar negeri negara selalu berorientasi pada kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan. Dalam konteks Sudan, UEA mendefinisikan kepentingannya dalam bentuk keamanan maritim, akses ekonomi, dan pengaruh geopolitik. Sudan dipandang sebagai ruang strategis yang dapat meningkatkan posisi relatif UEA dalam persaingan regional (Morgenthau, 1948).

Dalam perspektif realisme struktural, keterlibatan UEA juga dapat dipahami sebagai respons terhadap distribusi kekuatan dalam sistem regional. Afrika Timur dan kawasan Laut Merah menjadi arena kompetisi antara berbagai aktor regional dan global. Untuk mencegah dominasi aktor lain, UEA berupaya menanamkan pengaruhnya di Sudan sebagai bagian dari

strategi balancing (Waltz, 1979). Realisme ofensif menekankan bahwa negara cenderung memaksimalkan kekuatannya untuk mengamankan posisi strategis. Dari sudut pandang ini, keterlibatan UEA di Sudan bukan sekadar defensif, tetapi juga ofensif dalam arti memperluas pengaruh ke kawasan baru. Sudan menjadi sarana bagi UEA untuk memperluas jangkauan geopolitiknya di Afrika (Mearsheimer, 2014).

Kepentingan nasional UEA dalam konflik Sudan juga mencerminkan konsep security maximization. UEA memandang stabilitas Sudan sebagai faktor penting dalam menjaga keamanan kawasan Laut Merah. Ketidakstabilan Sudan dipersepsikan sebagai potensi ancaman yang dapat mengganggu kepentingan keamanan UEA secara tidak langsung (Buzan & Wæver, 2003). Dalam kerangka realisme neoklasik, kebijakan UEA juga dipengaruhi oleh faktor domestik seperti persepsi elite dan kapasitas negara. Elite politik UEA memandang Afrika Timur sebagai kawasan strategis baru, sehingga mendorong kebijakan luar negeri yang lebih aktif di Sudan. Persepsi ancaman dan peluang ini memediasi respons UEA terhadap struktur internasional (Rose, 1998).

Pendekatan realisme juga menjelaskan penggunaan instrumen non-militer oleh UEA. Meskipun realisme sering diasosiasikan dengan kekuatan militer, instrumen ekonomi dan diplomatik juga dipandang sebagai sumber kekuatan. Investasi dan bantuan ekonomi UEA di Sudan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengaruh tanpa menimbulkan biaya politik tinggi (Baldwin, 1985). Keterlibatan UEA di Sudan menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat dikonversi menjadi kekuatan politik. Dalam perspektif realisme, kemampuan untuk memengaruhi keputusan aktor lain melalui insentif ekonomi merupakan bentuk kekuasaan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan konsep economic statecraft (Baldwin, 1985).

Analisis realis juga menyoroti sifat pragmatis kebijakan UEA. UEA tidak terikat secara kaku pada norma atau nilai universal, melainkan berfokus pada hasil yang menguntungkan kepentingan nasional. Pendekatan ini menjelaskan fleksibilitas UEA dalam berinteraksi dengan berbagai aktor domestik Sudan (Mearsheimer, 2014). Namun demikian, realisme juga membantu menjelaskan keterbatasan strategi UEA. Dalam sistem internasional yang kompleks, upaya memaksimalkan kepentingan sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Keterlibatan UEA berpotensi memicu resistensi dari aktor lain dan memperumit dinamika konflik Sudan (Waltz, 1979).

Dalam perspektif kepentingan nasional, peran UEA juga mencerminkan prioritas jangka pendek dibandingkan tujuan jangka panjang. Stabilitas jangka pendek sering kali diprioritaskan dibandingkan pembangunan institusi politik yang inklusif. Hal ini sesuai dengan logika realisme yang menempatkan keamanan di atas nilai normatif (Paris, 2004). Realisme juga menjelaskan mengapa UEA lebih memilih pendekatan bilateral daripada multilateral. Pendekatan bilateral memberikan kontrol yang lebih besar terhadap hasil kebijakan dan mengurangi ketergantungan pada konsensus multilateral yang sering kali lamban dan kompromistis (Keohane, 1984).

Dalam konteks Sudan, pendekatan bilateral memungkinkan UEA untuk menyesuaikan kebijakan secara cepat sesuai dengan dinamika konflik. Fleksibilitas ini merupakan keuntungan strategis dalam lingkungan konflik yang volatil (Ulrichsen, 2020). Analisis realis juga menyoroti peran persepsi ancaman dalam kebijakan UEA. Ancaman

terhadap jalur maritim dan stabilitas regional dipersepsikan sebagai risiko eksistensial, sehingga mendorong keterlibatan aktif di Sudan. Persepsi ini membentuk kalkulasi kebijakan luar negeri UEA (Buzan & Wæver, 2003). Namun, perspektif realisme juga membuka ruang kritik. Fokus berlebihan pada kepentingan nasional dan kekuasaan dapat mengabaikan dimensi kemanusiaan dan politik domestik Sudan. Hal ini berpotensi memperpanjang konflik dan menghambat resolusi jangka panjang (Autesserre, 2014).

Dalam kerangka realisme kritis, peran UEA dapat dipandang sebagai contoh bagaimana aktor eksternal memanfaatkan konflik domestik untuk kepentingan strategis. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai legitimasi dan etika kebijakan luar negeri berbasis kepentingan semata (Barnett & Duvall, 2005). Meski demikian, dari sudut pandang UEA, pendekatan realis dipandang sebagai pilihan rasional dalam sistem internasional yang tidak pasti. Negara ini beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif, sehingga mengutamakan keamanan dan pengaruh dianggap sebagai keharusan strategis (Morgenthau, 1948).

Analisis ini menunjukkan bahwa peran UEA dalam konflik Sudan tidak dapat dilepaskan dari logika realisme dan kepentingan nasional. Kedua kerangka tersebut memberikan penjelasan yang kuat terhadap motivasi, strategi, dan implikasi keterlibatan UEA. Secara keseluruhan, perspektif kepentingan nasional dan realisme membantu memahami konsistensi kebijakan UEA di Sudan. Meskipun menghadapi kritik dan keterbatasan, pendekatan ini tetap menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan luar negeri UEA. Dalam dinamika konflik Sudan yang semakin kompleks sejak pecahnya pertempuran antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) pada 2023, Uni Emirat Arab (UEA) menjadi salah satu aktor eksternal yang kerap disebut dalam berbagai laporan media internasional dan lembaga pengamat konflik. Namun demikian, pemerintah UEA secara konsisten membantah keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pihak tertentu dalam konflik tersebut.

Pemerintah UEA melalui Kementerian Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa negaranya tidak terlibat dalam penyediaan senjata, dukungan militer, ataupun bantuan logistik kepada pihak manapun dalam konflik Sudan. UEA menegaskan bahwa kebijakannya berfokus pada upaya de-eskalasi, perlindungan warga sipil, dan dukungan terhadap proses dialog politik yang inklusif (UAE Ministry of Foreign Affairs, 2023). Dalam sejumlah forum internasional, termasuk pertemuan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan UEA menyatakan komitmennya terhadap prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan Sudan. UEA juga menolak tuduhan bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke kawasan terdampak konflik digunakan sebagai kedok dukungan militer (UN Security Council Meeting Records, 2024).

UEA secara aktif mbingkai keterlibatannya dalam konteks kemanusiaan. Sejak awal konflik terbuka pada April 2023, UEA menyalurkan bantuan medis, pangan, dan logistik melalui jalur resmi serta bekerja sama dengan badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional. Bantuan tersebut diposisikan sebagai bagian dari komitmen UEA terhadap stabilitas regional dan solidaritas kemanusiaan (UNOCHA, 2024). Pendekatan ini konsisten dengan pola kebijakan luar negeri UEA dalam beberapa konflik regional lainnya, di mana diplomasi kemanusiaan digunakan sebagai instrumen membangun citra negara

sebagai aktor stabilisasi dan mediator regional (Ulrichsen, 2020). Dalam pernyataan resminya, UEA menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mendorong gencatan senjata permanen dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Beberapa laporan investigatif media internasional mengindikasikan dugaan adanya aliran logistik atau dukungan finansial kepada RSF melalui jalur tidak langsung. Namun, UEA membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim yang tidak berdasar serta bermuatan politis (Reuters, 2024). Pemerintah UEA menyatakan bahwa negaranya tidak memihak pada salah satu faksi dan tidak memiliki kepentingan untuk memperpanjang konflik.

Dalam kerangka diplomatik, UEA juga menyampaikan bahwa tuduhan tersebut berpotensi merusak reputasi internasionalnya sebagai mitra pembangunan dan mediator konflik di kawasan Afrika Timur. Bantahan ini menunjukkan bahwa reputasi global dan citra sebagai aktor stabil menjadi bagian penting dari kepentingan nasional UEA (Almezaini, 2020). Sebagai respons terhadap konflik Sudan, UEA turut mendukung berbagai inisiatif diplomatik regional dan internasional, termasuk kerja sama dengan Arab Saudi dalam memfasilitasi dialog di Jeddah. Partisipasi dalam inisiatif tersebut digunakan UEA sebagai bukti bahwa kebijakan luar negerinya bertujuan menciptakan stabilitas, bukan memperkeruh konflik (International Crisis Group, 2023). Keterlibatan dalam mekanisme multilateral ini memperlihatkan upaya UEA untuk menjaga legitimasi internasionalnya sekaligus menepis narasi bahwa negara tersebut bertindak sebagai aktor proxy dalam konflik Sudan.

Dalam perspektif teori kepentingan nasional, bantahan resmi UEA dapat dipahami sebagai bagian dari strategi menjaga reputasi internasional dan menghindari sanksi atau tekanan diplomatik yang dapat merugikan kepentingan ekonominya (Morgenthau, 1948). Reputasi sebagai negara yang stabil dan bertanggung jawab sangat penting bagi UEA, terutama mengingat posisinya sebagai pusat perdagangan dan investasi global. Sementara itu, dalam perspektif realisme, bantahan tersebut dapat pula dilihat sebagai strategi rasional untuk meminimalkan biaya politik internasional tanpa harus sepenuhnya meninggalkan kepentingan strategis di kawasan (Mearsheimer, 2014). Negara dalam sistem internasional anarkis akan berusaha menyeimbangkan antara proyeksi kekuatan dan pengelolaan persepsi internasional.

Bantahan UEA tidak serta-merta menghilangkan persepsi adanya keterlibatan eksternal dalam konflik Sudan. Sebaliknya, dinamika ini menunjukkan bagaimana konflik domestik dapat menjadi arena pertarungan narasi di tingkat internasional. Di satu sisi, UEA menegaskan komitmen stabilisasi; di sisi lain, laporan-laporan independen terus mengaitkan negara tersebut dengan dinamika militer di lapangan (de Waal, 2019). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara narasi resmi dan persepsi internasional, yang pada akhirnya menjadi bagian dari kompleksitas konflik Sudan itu sendiri.

### **Implikasi Keterlibatan Uni Emirat Arab terhadap Stabilitas Regional Afrika Timur dan Laut Merah**

Keterlibatan Uni Emirat Arab (UEA) dalam dinamika konflik Sudan memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas regional Afrika Timur dan kawasan Laut Merah. Konflik Sudan tidak hanya berdimensi domestik, tetapi juga memiliki dampak lintas batas yang memengaruhi keamanan kawasan. Oleh karena itu, peran aktor eksternal seperti UEA

tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi regional yang lebih besar (de Waal, 2019). Salah satu implikasi utama adalah perubahan keseimbangan kekuatan regional. Keterlibatan aktif UEA di Sudan berkontribusi pada terbentuknya pola baru distribusi pengaruh di Afrika Timur. Kehadiran UEA memperkuat posisi aktor-aktor Teluk dalam dinamika regional yang sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh negara-negara Afrika dan kekuatan Barat tradisional (Ulrichsen, 2020).

Dalam konteks keamanan Laut Merah, keterlibatan UEA berpotensi meningkatkan stabilitas jalur pelayaran strategis melalui penguatan kontrol keamanan maritim. Stabilitas di Sudan dipandang sebagai faktor penting dalam mencegah munculnya ancaman non-tradisional seperti pembajakan, penyelundupan, dan terorisme maritim yang dapat mengganggu perdagangan global (Bueger, 2015). Namun, keterlibatan UEA juga memiliki implikasi negatif potensial. Dukungan terhadap aktor tertentu dalam konflik Sudan dapat memperdalam fragmentasi politik domestik dan memperpanjang konflik bersenjata. Hal ini justru dapat menciptakan instabilitas jangka panjang yang berdampak buruk bagi keamanan kawasan Afrika Timur (Autesserre, 2014).

Implikasi lain terlihat pada dinamika hubungan antarnegara di Afrika Timur. Keterlibatan UEA di Sudan memengaruhi relasi Sudan dengan negara-negara tetangganya, termasuk Ethiopia, Eritrea, dan Chad. Negara-negara ini harus menyesuaikan kebijakan luar negerinya terhadap realitas baru kehadiran aktor Teluk dalam konflik regional (Clapham, 2017). Dalam kerangka regionalisme keamanan, konflik Sudan yang dipengaruhi oleh aktor eksternal berpotensi melemahkan mekanisme keamanan regional seperti IGAD dan Uni Afrika. Ketika aktor eksternal memainkan peran dominan, kapasitas organisasi regional untuk mengelola konflik secara mandiri menjadi terbatas (Williams, 2018).

Keterlibatan UEA juga berimplikasi pada meningkatnya kompetisi geopolitik di kawasan Laut Merah. Kawasan ini menjadi arena persaingan antara negara-negara Teluk, Turki, serta kekuatan global seperti Rusia dan Tiongkok. Kompetisi ini meningkatkan kompleksitas dinamika keamanan regional (Al-Mezaini & Rickli, 2017). Dalam perspektif keamanan manusia, implikasi keterlibatan UEA juga menyentuh dimensi kemanusiaan. Ketika konflik diperpanjang oleh dukungan eksternal, dampak terhadap warga sipil semakin besar, termasuk pengungsian, krisis pangan, dan pelanggaran HAM. Stabilitas regional tidak dapat dilepaskan dari kondisi keamanan manusia di Sudan (Paris, 2004).

Namun demikian, keterlibatan UEA juga membuka peluang bagi stabilisasi regional jika diarahkan pada upaya mediasi dan rekonstruksi pascakonflik. Kapasitas ekonomi dan diplomatik UEA dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan Sudan dan mengurangi dampak konflik terhadap kawasan (Barnett & Duvall, 2005). Implikasi ekonomi regional juga signifikan. Ketidakstabilan Sudan berdampak pada arus perdagangan lintas Afrika Timur, sementara stabilisasi dapat meningkatkan konektivitas ekonomi regional. Investasi UEA berpotensi mendorong integrasi ekonomi, tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan baru (Keohane & Nye, 2012).

Dalam konteks keamanan energi global, stabilitas kawasan Laut Merah yang dipengaruhi oleh konflik Sudan berdampak pada pasar energi internasional. Gangguan terhadap jalur pengiriman energi dapat meningkatkan volatilitas pasar, yang berdampak luas bagi negara-negara konsumen dan produsen energi (Yergin, 2020). Implikasi politik juga

terlihat pada legitimasi pemerintahan Sudan. Dukungan eksternal dari UEA dapat memperkuat aktor tertentu, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi politik domestik jika dipersepsikan sebagai intervensi asing (Young, 2021).

Implikasi lainnya adalah terbentuknya pola keamanan baru berbasis kepentingan eksternal. Keamanan regional Afrika Timur semakin dipengaruhi oleh kalkulasi strategis aktor non-Afrika, yang menggeser paradigma keamanan dari regional ownership ke external-driven security (Buzan & Wæver, 2003). Meskipun demikian, negara-negara Afrika Timur tidak sepenuhnya pasif. Mereka tetap memiliki ruang untuk menyeimbangkan pengaruh eksternal melalui diplomasi regional dan penguatan institusi regional. Keberhasilan upaya ini akan menentukan masa depan stabilitas kawasan (Williams, 2018).

Dalam jangka panjang, implikasi keterlibatan UEA di Sudan bergantung pada arah kebijakan yang diambil. Jika berfokus pada stabilisasi inklusif, keterlibatan tersebut dapat berkontribusi positif. Sebaliknya, jika semata berorientasi pada kepentingan sempit, konflik berpotensi berlanjut dan meluas (de Waal, 2019). Analisis ini menunjukkan bahwa keterlibatan UEA memiliki implikasi ambivalen terhadap stabilitas regional. Tidak sepenuhnya stabilisator maupun destabilisator, peran UEA sangat bergantung pada strategi dan konteks implementasinya. Dengan demikian, konflik Sudan menjadi cerminan bagaimana intervensi aktor eksternal di Afrika Timur membawa konsekuensi multidimensional. Stabilitas regional Afrika Timur dan Laut Merah tidak dapat dipisahkan dari dinamika konflik Sudan dan peran aktor seperti UEA di dalamnya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan Uni Emirat Arab (UEA) dalam dinamika konflik Sudan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons kemanusiaan atau upaya stabilisasi konflik, melainkan sebagai bagian dari strategi kepentingan nasional dan proyeksi kekuatan regional UEA di Afrika Timur dan kawasan Laut Merah. Konflik Sudan menjadi arena strategis yang memungkinkan UEA memperluas pengaruh geopolitik, ekonomi, dan keamanan di luar kawasan Teluk. Posisi geografis Sudan yang strategis di pesisir Laut Merah menjadikannya negara kunci dalam arsitektur keamanan maritim regional. Stabilitas Sudan memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran jalur perdagangan internasional dan keamanan energi global. Dalam konteks ini, keterlibatan UEA mencerminkan upaya rasional untuk melindungi kepentingan nasionalnya yang sangat bergantung pada stabilitas jalur pelayaran dan perdagangan internasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kepentingan ekonomi menjadi salah satu faktor utama keterlibatan UEA di Sudan. Potensi sumber daya alam Sudan, khususnya di sektor pertanian dan pertambangan, dipandang sejalan dengan strategi diversifikasi ekonomi dan ketahanan pangan UEA. Dengan demikian, konflik Sudan tidak hanya memiliki dimensi keamanan, tetapi juga dimensi ekonomi-politik yang signifikan bagi UEA.

Dari perspektif teori realisme, kebijakan UEA di Sudan menunjukkan karakter pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan. UEA bertindak sebagai aktor rasional yang berusaha memaksimalkan keuntungan strategisnya dalam sistem internasional yang kompetitif dan anarkis. Pilihan-pilihan kebijakan UEA mencerminkan prioritas terhadap stabilitas jangka pendek dan pengamanan kepentingan nasional dibandingkan dengan

pembangunan politik jangka panjang di Sudan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan UEA berkontribusi pada meningkatnya kompleksitas konflik Sudan. Kehadiran aktor eksternal dengan kepentingan strategis masing-masing menambah lapisan konflik dan memperumit upaya resolusi konflik yang berkelanjutan. Konflik Sudan tidak lagi bersifat domestik, tetapi telah terintegrasi ke dalam dinamika geopolitik regional dan internasional.

Dari sisi implikasi regional, keterlibatan UEA memiliki dampak ambivalen terhadap stabilitas Afrika Timur dan Laut Merah. Di satu sisi, keterlibatan tersebut berpotensi mendukung stabilitas keamanan maritim dan menjaga jalur perdagangan strategis. Namun di sisi lain, keterlibatan yang bersifat selektif dan berbasis kepentingan berpotensi memperpanjang konflik dan menciptakan instabilitas jangka panjang di kawasan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa keterlibatan aktor eksternal seperti UEA berpotensi melemahkan peran mekanisme regional Afrika dalam penyelesaian konflik. Dominasi aktor non-Afrika dalam dinamika konflik Sudan menunjukkan keterbatasan kapasitas organisasi regional Afrika dalam mengelola konflik secara mandiri, sekaligus mencerminkan pergeseran arsitektur keamanan regional.

Secara keseluruhan, peran UEA dalam konflik Sudan mencerminkan transformasi kebijakan luar negeri negara tersebut dari aktor regional Teluk menjadi aktor dengan kepentingan lintas kawasan. Sudan menjadi salah satu titik penting dalam strategi regional UEA di Afrika Timur dan Laut Merah, yang didorong oleh kombinasi kepentingan keamanan, ekonomi, dan geopolitik. Dengan demikian, konflik Sudan tidak hanya merepresentasikan krisis domestik, tetapi juga menjadi cermin dari dinamika politik kekuatan regional dan internasional di Afrika Timur. Pemahaman terhadap peran UEA memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana konflik internal di Afrika semakin terhubung dengan kepentingan strategis aktor eksternal.

### Daftar Pustaka

- Almezaini, K. (2020). *The UAE and foreign policy activism: Strategic ambition in the Middle East and Africa*. London: Routledge.
- Al-Mezaini, K., & Rickli, J. M. (2017). *The Small Gulf States: Foreign and Security Policies before and after the Arab Spring*. London: Routledge.
- Autesserre, S. (2014). *Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton: Princeton University Press.
- Barnett, M., & Duvall, R. (2005). Power in international politics. *International Organization*, 59(1), 39–75.
- Bertelsmann Stiftung. (2022). *BTI Transformation Index: United Arab Emirates and Sudan*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Brookings Institution. (2020). *The Gulf's New Frontier: The UAE and Saudi Arabia in the Horn of Africa*. Washington, D.C.: Brookings Institution.

- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carnegie Middle East Center. (2018). Verhoeven, H. *The Gulf and the Horn of Africa: Changing Geopolitics and Strategic Rivalries*. Beirut: Carnegie Endowment for International Peace.
- Clapham, C. (2017). *The Horn of Africa: State Formation and Decay*. London: Hurst & Company.
- Clingendael Institute. (2018). Meester, J., van den Berg, W., & Verhoeven, H. *Riyadh and Abu Dhabi in the Horn: Scramble for Influence or Peaceful Coexistence?* The Hague: Clingendael Institute.
- de Waal, A. (2019). *Sudan: A Political Marketplace*. London: LSE Conflict Research Programme.
- de Waal, A. (2019). *Sudan's unfinished democracy: The promise and betrayal of a people's revolution*. London: Hurst & Company.
- Gallopin, J.-B. (2023). *Sudan's Fragmentation and the Gulf's Role: The UAE, Saudi Arabia, and Egypt in the Post-Bashir Era*. Brussels: International Crisis Group.
- International Crisis Group. (2023). *Sudan's Catastrophic Conflict: Regional and International Implications*. Brussels: International Crisis Group.
- International Crisis Group. (2023). *Sudan's conflict and the role of external actors in the Red Sea region*. Brussels: ICG Report.
- International Crisis Group. (2024). *Escalating Conflict in Sudan: Regional Implications*. Brussels: International Crisis Group.
- Juneau, T. (2020). The UAE's regional policy: A small state's quest for security. *International Affairs*, 96(6), 1543–1562.
- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. New York: Random House.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and Interdependence*. 4th ed. Boston: Longman.
- Krane, J. (2019). *Energy Governance in the Gulf States*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Krieg, A. (2021). The United Arab Emirates and the geopolitics of the Horn of Africa: Power projection, security partnerships, and regional rivalries. *Middle East Policy*, 28(2), 45–67.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The tragedy of great power politics* (Updated ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The Tragedy of Great Power Politics*. Updated ed. New York: W. W. Norton & Company.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.

- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Paris, R. (2004). *At War's End: Building Peace after Civil Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2016). *Contemporary Conflict Resolution*. 4th ed. Cambridge: Polity Press.
- Reuters. (2024). UAE denies supplying weapons to Sudan's Rapid Support Forces. Reuters International News Report.
- Rose, G. (1998). Neoclassical realism and theories of foreign policy. *World Politics*, 51(1), 144–172.
- SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). (2022). *Arms Transfers Database*. Stockholm: SIPRI.
- Spykman, N. J. (1944). *The Geography of the Peace*. New York: Harcourt, Brace and Company.
- Stark, A. (2020). *The Gulf's New Frontier: The UAE and Saudi Arabia in the Horn of Africa*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- The World Bank. (2023). *Sudan Economic Monitor: Navigating Conflict and Fragility*. Washington, D.C.: The World Bank Group.
- UAE Ministry of Foreign Affairs. (2023). *Statement on the situation in Sudan and commitment to humanitarian assistance*. Abu Dhabi: Official Press Release.
- Ulrichsen, K. C. (2020). *The Gulf States in International Political Economy*. London: Palgrave Macmillan.
- Ulrichsen, K. C. (2020). *The United Arab Emirates: Power, politics and policy-making*. London: Routledge.
- Ulrichsen, K. C. (2022). *The UAE and the Red Sea: Expanding Power Projection through Ports and Logistics*. London: Chatham House.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). (2024). *Sudan humanitarian situation report*. New York: United Nations.
- United Nations Security Council. (2023). *Report of the Panel of Experts on the Sudan (S/2023/99)*. New York: United Nations.
- United Nations Security Council. (2024). *Meeting records on the situation in Sudan*. New York: United Nations Official Documents.
- Verhoeven, H. (2018). *The Gulf and the Horn of Africa: Changing geopolitics and strategic rivalries*. Carnegie Middle East Center.
- Williams, P. D. (2018). *Fighting for Peace in Somalia: A History and Analysis of the African Union Mission (AMISOM)*. Oxford: Oxford University Press.
- Woertz, E. (2013). *Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East*. Oxford: Oxford University Press.
- Yergin, D. (2020). *The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations*. New York: Penguin Press.
- Young, J. (2021). Sudan's political crisis and regional implications. *African Affairs*, 120(480), 361–372.